



LAPORAN

Audiensi Tim CoLUPSIA

(Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangement Project)

Di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu



Putussibau, 18 September 2013

Notulensi

Audiensi tim CoLUPSIA di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Ruang Rapat DPRD, 18 September 2013

Peserta Audiensi : terlampir

Ringkasan hasil rapat:

1. Hasil studi CoLUPSIA yang menyediakan data dan informasi (sosial ekonomi, biofisik, pemetaan dan alokasi lahan) diapresiasi oleh anggota DPRD Kapuas Hulu ditengah kondisi dimana tata ruang (RTRW) Kapuas Hulu sedang dalam pembahasan. Hasil studi ini merupakan hal yang fundamental dan agar data-data CoLUPSIA dapat dimasukkan kedalam pengajuan usulan RTRW yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan RPJMD.
2. DPRD Kapuas Hulu meminta CoLUPSIA merangkum hasil studi tentang draft status dan alokasi tata guna lahan dan mengkomunikasikan kepada dinas instansi terkait agar mendapat dukungan secara kelembagaan baik dari DPRD maupun dari Bupati.
3. Terkait dengan upaya CoLUPSIA membawa hasil studi tentang draft status dan alokasi tata guna lahan ke tingkat nasional dalam bentuk seminar di Jakarta, diperlukan dukungan dan keterlibatan DPRD dan Dinas instansi terkait.

Pembukaan oleh M. Yusuf Habibi S. Sos (Wakil Ketua I DPRD)

Selamat pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya dengan selalu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua yang ada dapat berkumpul di ruangan ini dalam suatu kegiatan sesuai srt yang diterima yakni permohonan audiensi dan diseminasi hasil kegiatan Proyek Kolaboratif Perencanaan Tata Guna Lahan (CoLUPSIA) di Kabupaten Kapuas Hulu. Sudah disampaikan surat kepada Ketua tapi berhubung ada tugas mendadak Beliau ke Pontianak, jadi Saya diminta untuk menerima tamu sesuai dengan surat permohonan ini.

Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Tim Peneliti. Saya minta maaf kepada anggota DPRD yang terhormat karena saya tidak sempat membuat surat undangan ataupun pemberitahuan terlebih dahulu. Saya harap ini bisa dimaklumi karena keg hari ini bertujuan baik untuk kemajuan KH di masa yang akan datang. Saya persilahkan kepada tim untuk dapat memaparkan hasil kegiatan CoLUPSIA.

Bayuni Shantiko: Assalamualaikum Wr Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesediaan Bapak-bapak untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Kami juga berterima kasih untuk kesediaan Bapak Wakil Ketua I untuk memimpin acara pada hari ini. Pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan tim kami, yakni Dr. Yves Laumonier (CIRAD) selaku Project Team Leader CoLUPSIA, saya sendiri Bayuni Shantiko (CIFOR),

Valentinus Heri (Riak Bumi), Danan Prasetyo Hadi (CoLUPSIA GIS), Alfa Ratu Simarangkir (CoLUPSIA Koordinator Kapuas Hulu), Ade Yanuwardi (CoLUPSIA Staf Penghubung).

Presentasi “Sekilas tentang Proyek CoLUPSIA” oleh Dr. Yves Laumonier

Selamat pagi Bapak-bapak. Saya akan mempresentasikan kegiatan CoLUPSIA di Kapuas Hulu yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Hari ini kita akan mendiskusikan usulan tentang pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan penggunaan lahan di Kapuas Hulu.

Kondisi saat ini yang terjadi adalah fungsi ekologis yang disediakan oleh hutan makin hilang dimana banyak masyarakat memiliki tingkat ketergantungan terhadap sumber daya alam. Selain itu, Ilmuwan memperkirakan bahwa emisi yang ditimbulkan oleh deforestasi dan degradasi hutan mencapai 20 persen dari seluruh emisi gas rumah kaca per tahun. Sehingga saat itu Uni Eropa berpikir perlunya disiapkan perencanaan Tata Guna Lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan tanpa merusak lingkungan, juga dengan secara kolaboratif dan adil. Kegiatan. Dua lembaga peneliti yakni CIRAD (Lembaga penelitian Agronomi dan Kehutanan di Perancis) dan CIFOR (Lembaga penelitian Kehutanan) mendapat bantuan dana untuk kegiatannya dari Uni Eropa. Kegiatan dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga lokal yakni Telapak (LSM Lingkungan), Huma (LSM Hukum) dan Riak Bumi (LSM Pontianak).

Adapun tiga tujuan proyek CoLUPSIA yakni:

1. Mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan, penggunaan lahan dan pengelolaan sumberdaya alam
2. Studi tentang pendekatan baru terhadap mitigasi kerusakan lingkungan dengan mengembangkan mekanisme insentif pembiayaan atas jasa lingkungan
3. Mendorong pengembangan kelembagaan yang mempromosikan kebijakan dan instrumen terkait lahan termasuk pengembangan masyarakat

Tantangan dalam penerapan konsep tata guna lahan secara kolaboratif, meliputi:

- Mengidentifikasi pihak pihak “stakeholders”
- Menentukan lokasi proyek dan arealnya
- Menentukan dan menginformasikan sistem tenurial, termasuk hak milik, akses, hak guna
- Kerangka kerja legal dan institutional
- Mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan dan pengelolaan sumberdaya alam (PPA). Beberapa orang di Putussibau sudah kenal dengan metode ini dan Pak Bayu akan memberikan presentasi lebih lanjut tentang hal ini.

Presentasi “Mendorong Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Alokasi Fungsi Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PPA)” oleh Bayuni Shantiko

Tujuan utama : Proses kolaborasi dengan para pihak di KH

Saat ini kabupaten KH mendeklarasikan diri sebagai Kankon dan saat yang sama Kabupaten juga dalam proses membangun dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Apa yang mungkin terjadi di KH di 20 tahun mendatang? Kami melakukan analisa prospektif partisipatif (participatory prospective analysis – PPA), kami memfasilitasi proses ini. Seperti apa pembangunan yang akan datang di Kapuas Hulu? Kami mengembangkan visi yang disepakati bersama para pihak di KH. Visi bersama memudahkan kita melakukan perencanaan dan dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Dalam proses ini kami mengundang para pihak yang ahli di bidangnya yakni dari Pemda meliputi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga, dan juga Bapak Baco Maiwa, SE yang cukup aktif terlibat dalam kegiatan ini. dan dari masyarakat kami melibatkan masyarakat adat, nelayan, petani dan dari pihak swasta kami melibatkan salah satu perusahaan kelapa sawit. Proses pelaksanaan kegiatan PPA terdiri dari:

1. Semi lokakarya PPA di Pontianak dan Putussibau yakni pada bulan Mei – Juli 2011
2. Konsultasi publik di kecamatan pada Desember 2011
3. Konsultasi publik di kabupaten pada April 2012
4. Penyusunan usulan rencana aksi (2011-2012)

Para pihak menetapkan adanya 50 variabel dari proses PPA dengan variabel kunci berupa kebijakan Pemda, penggunaan teknologi, hukum adat dan kearifan lokal, pola pikir, partisipasi, pendidikan dan keterampilan. Dari variabel kunci inilah muncul empat skenario masa depan Kapuas Hulu yakni:

1. Skenario Langkah Serampak menggambarkan keharmonisan hubungan antara Pemda, masyarakat dan sektor swasta dalam rencana tata guna lahan
2. Skenario Lempar koin sembunyi tangan menggambarkan kondisi dimana ada masyarakat dan lingkungan tidak diperdulikan sehingga lingkungan menjadi rusak
3. Skenario Mendulang emas mendapat batu menggambarkan konflik yang terjadi di dalam masyarakat karena kemiskinan dan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
4. Skenario Makan tuba buah menggambarkan perlambatan pembangunan dimana kebijakan senantiasa berganti-ganti yang mengakibatkan tidak adanya progress dari kebijakan yang terdahulu

Dari keempat skenario ini, skenario yang diinginkan atau dicita-citakan oleh masyarakat adalah skenario 1. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pelaksanaan PPA, yakni:

1. Menyatukan peserta dgn latar belakang dan status berbeda. Proses PPA adalah partisipatif yang alami, menggunakan konsensus untuk kesepakatan akhir
2. Sukses membangun atmosfir kolaboratif, semua peserta dapat bebas berbagi pikiran dengan nyaman dan mendapat hak yg sama

3. Membantu birokrat memahami kapasitas masyarakat yg mampu memberikan kontribusi yg potensial, dan membantu masyarakat untuk berpartisipasi (terkait kendala bahasa dan status)
4. Membantu stakeholder menyiapkan kebijakan regional tentang masa depan perencanaan penggunaan lahan
5. Dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda, misal: program pemberdayaan masyarakat, rencana kerja SKPD, dll.

Saya kembalikan ke Dr. Yves Laumonier untuk mempresentasikan usulan revisi peta status lahan yang bagaimana yang sesuai untuk Kapuas Hulu.

Presentasi “Usulan tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perencanaan Penggunaan Lahan di Kapuas Hulu” oleh Dr. Yves Laumonier

Kita akan melihat aspek biofisik kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu dan juga alasan perlunya dilakukan revisi terhadap peta status lahan. Dalam perencanaan tata guna lahan ada tiga komponen utama yang diperlukan yakni:

1. Penutupan Lahan
2. Kesesuaian Lahan (didasarkan pada tanah dan kelerengan)
3. Status Lahan (alokasi lahan). Jika Status Lahan tidak jelas bagi semua pihak, maka intervensi pembangunan (investasi, perencanaan tata guna lahan, proyek REDD/PES dll) tidak dapat diimplementasikan.

Penggunaan peta tutupan lahan dengan skala yang lebih besar seperti skala 1:50.000 akan membuat data tutupan lahan yang diperoleh menjadi lebih detail. Ada juga peta topografi dengan skala 1:50.000 jadi CoLUPSIA punya data yang cukup detail untuk satu Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan adanya peta tutupan lahan dan topografi yang cukup detail maka jenis hutan yang ada di Kapuas Hulu akan semakin jelas diidentifikasi seperti ada hutan dataran rendah, ada hutan gunung, ada hutan rawa yang terdiri atas beberapa macam hutan gambut tergantung dari kedalaman gambutnya. Di skala ini kita juga bisa menunjukkan dimana kebun karet, jadi dengan data yang cukup detail seperti ini maka pemerintah dapat memilih opsi yang pas untuk dikembangkan di daerah ini untuk sehubungan dengan rencana tata guna lahannya.

Status lahan yang berlaku di Kabupaten Kapuas Hulu masih berdasarkan atas SK yang dikeluarkan tahun 2000 dimana kawasannya masuk dalam kawasan taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, huta produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi dan areal penggunaan lain.

Beberapa kelemahan pemetaan dan skala untuk perencanaan spasial di tingkat kabupaten adalah permasalahan skala. Data spasial yang digunakan yakni 1:250.000 ternyata tidak cukup detail untuk tujuan pelaksanaan di tingkat kabupaten. Karena data spasial tidak akurat di skala besar maka zonasi juga menjadi tidak sesuai dengan topografi, hidrografi atau tutupan lahan di lapangan, lokasi batas tidak jelas karena titik GPS diambil dari peta sebelum ke lapangandan bukan sebaliknya. Kelemahan yang lain yakni status hukum juga menjadi tidak jelas.

Beberapa masalah batas ditemukan saat peta model elevasi digital skala 1:50.000 di overlay dengan peta kawasan hutan skala 1:250.000. Beberapa penetapan status kawasan menjadi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, misalnya kondisi aktual daerah dengan karakteristik HP ternyata ditetapkan dengan status HPT dan ada juga kawasan yang kondisi aktualnya masuk HL tapi pada kenyataannya status yang ditetapkan bukan HL. Oleh karena itu untuk pelaksanaan di lapangan peta yang digunakan sebaiknya menggunakan skala yang lebih besar misalnya 1:50.000.

Land status ditetapkan berdasarkan skor hutan yang nilainya ditentukan oleh kelerengan, erodibilitas tanah dan intensitas curah hujan. Jika skor lebih dari 175 maka kawasan itu termasuk hutan lindung, jika skor diantara 125 – 175 maka kawasan tersebut termasuk hutan produksi terbatas dan jika kurang dari 125 maka kawasan termasuk dalam hutan produksi terbatas.

Penggunaan skor hutan dalam perencanaan tata guna lahan mendetail tingkat kabupaten memiliki keterbatasan seperti skor kelerengan yang digunakan tidak sesuai untuk pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pertanian dan juga terdapat perbedaan kelas lereng yang digunakan oleh departemen yang ada di Kemenhut seperti kelas lereng yang digunakan Ditjen Plan dan BRLKT. Skor hutan yang digunakan juga sangat umum dan tidak sesuai dengan kondisi lokal. Begitu juga dengan skor curah hujan yang perlu untuk diteliti lebih lanjut mengingat masih sedikitnya stasiun lokal yang ada saat ini.

Metode kehutanan ini kami gunakan dalam studi kami, namun dengan menggunakan peta dengan skala 1:50.000. Selain menggunakan skala peta yang lebih besar, kami juga mengumpulkan data biofisik dengan memasang beberapa alat untuk mengukur erodibilitas tanah dan juga curah hujan di beberapa tempat. Hasil forest score dan slope dengan skala peta 1:50.000 jika di overlay dengan status kawasan hutan di peta dengan skala 1:250.000 menunjukkan adanya ketidaksesuaian penetapan kawasan hutan dengan karakteristik kawasan. Satu contoh yang sama untuk batas TN, kita bisa membuat batas sesuai dengan punggung bukit karena kita memiliki data yang lebih detail. Peta draf alokasi lahan merupakan usulan perubahan fungsi kawasan untuk level kabupaten. Mengingat usulan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu belum disahkan maka masih ada waktu untuk meninjau ulang usulan tersebut.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan yakni :

1. Rencana tata guna lahan dan beberapa zonasi tidak dapat dilaksanakan sebelum peta kawasan hutan dan perairan yang akurat, sesuai dengan skala besar di kabupaten,
2. Revisi peta kawasan hutan harus disetujui di tingkat kabupaten dan di tingkat propinsi

Banyak data biofisik dan sosial ekonomi yang telah dikumpulkan selama 3 tahun terakhir sebagai dasar untuk mengajukan usulan revisi tata ruang. Tapi untuk kegiatan ini kami memerlukan dukungan dalam pengajuan usulan ini ke tingkat pusat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Bayu tentang grup PPA untuk diskusi tentang perencanaan tata guna lahan di Kapuas Hulu. Ini bisa dijadikan sebagai suatu badan baru yang hasilnya dapat diintegrasikan dalam RPJMD Kapuas Hulu. Tata guna lahan menjadi tidak efektif tanpa kepastian status lahan hutan dan non hutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi status lahan hutan dan non hutan yang lebih rinci. Dukungan DPRD Kapuas Hulu diperlukan dalam dialog yang membahas usulan perubahan status lahan hutan dan non hutan yang dibuat oleh CoLUPSIA di tingkat propinsi dan nasional.

Harapan kami dengan dukungan dari DPRD, Kapuas Hulu bisa menjadi model untuk kabupaten lain. Model dalam arti penggunaan skala peta yang besar di tingkat kabupaten sehingga jika data dari semua kabupaten digabungkan maka data untuk tingkat propinsi akan menjadi lebih baik.

Bayuni Shantiko : Demikian presentasi kami dari Colupsia. Kami memerlukan dukungan Bapak-bapak untuk integrasi skenario PPA dalam RPJMD. Selain itu kami berharap agar peta tata guna lahan dapat dijadikan bahan diskusi bersama di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional untuk bisa dibuat revisi tata guna lahan yang lebih baik di masa yang akan datang.

M. Yusuf Habibi S. Sos : Terima kasih kepada tim yang sudah menyampaikan paparannya. Saya silakan kepada Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat untuk menyampaikan saran dan pendapatnya.

Hasil diskusi

1. Tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

- Tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu secara umum masih belum jelas. Pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Kapuas Hulu terpaksa dipending karena data pokok Kabupaten Kapuas Hulu dan data yang disodorkan banyak yang tidak sinkron/jauh berbeda (A. Manyu dan Budiarjo, S. H). Sehingga DPRD meminta data yang ada dilengkapi terlebih dahulu namun sampai saat ini belum diterima perbaikan-perbaikannya. Menjadi harapan saya, mudah-mudahan hasil kegiatan CoLUPSIA bisa membantu instansi terkait dalam menentukan kebijakan dan memberi data yang valid tentang Kabupaten Kapuas Hulu misalnya data (A. Manyu):
 - Dimana peruntukan areal untuk areal konservasi dan areal-areal lainnya?
 - Berapa lahan kebun dan ladang masyarakat? Supaya lahan ini tidak terkena dalam ijin perkebunan sawit.

Hasil studi CoLUPSIA yang menyediakan data dan informasi (sosial ekonomi, biofisik, pemetaan dan alokasi lahan) diapresiasi oleh anggota DPRD Kapuas Hulu ditengah kondisi dimana tata ruang (RTRW) Kapuas Hulu sedang dalam pembahasan. Hasil studi ini merupakan hal yang fundamental dan data-data CoLUPSIA ini sebaiknya dapat dimasukkan kedalam pengajuan usulan RTRW yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan RPJMD (Antonius L.).

RTRW Kabupaten Kapuas Hulu belum final. Sebaiknya dalam perbaikan data RTRW yang sedang berjalan saat ini data-data hasil penelitian ini dimasukkan. Diharapkan hasil penelitian yang diberikan dapat sedetail mungkin (M. Yusuf Habibi S. Sos).

- DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh CoLUPSIA yang mana dalam melakukan kegiatannya menggunakan dana yang berasal dari CoLUPSIA sendiri tanpa ada sedikitpun kontribusi dari APBD. Konsep PPA yang dikembangkan merupakan suatu konsep baru yang sangat bagus untuk mengembangkan rencana pembangunan di masa depan. Namun, ini bergantung pada kita apakah kita mau menggunakannya atau tidak (Baco Maiwa, SE).

- RTRW Kapuas Hulu sudah memasuki tahun kedua dan belum selesai hingga saat ini. Terdapat 3 masalah yang dapat saya jabarkan terkait dengan hal ini, diantaranya (Iman Shabirin):
 - Masalah visi. Kabupaten Kapuas Hulu adalah kabupaten konservasi melalui SK Bupati yang ditetapkan sejak tahun 2003. Namun, hal ini belum diperkuat dengan Perda.
 - Masalah regulasi. Ada ketidak konsistenan antara visi dengan ijin-ijin yang diberikan. Terlihat tidak adanya pelibatan para ahli yang berkompeten dibidangnya dalam penyusunan tata guna lahan sehingga antara visi dan regulasi menjadi tidak sejalan satu dengan yang lain.
 - Masalah kebijakan yang diambil. Keputusan yang berkaitan dengan tata guna lahan tidak melibatkan diskusi yang intensif sehingga saat pimpinan diganti maka kebijakan pun ikut diganti.

2. Peraturan dan implementasinya

- Banyak sekali peraturan yang sudah disahkan namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan tersebut (Antonius L.).
- Sejauh mana kita bisa mengubah kebijakan yang tidak menjadi kewenangan penuh Pemda? (Budiarjo, S. H).

3. Beberapa saran untuk CoLUPSIA yang diberikan oleh anggota DPRD Kapuas Hulu

- DPRD Kapuas Hulu meminta CoLUPSIA merangkum hasil studi tentang draft status dan alokasi tata guna lahan dan mengkomunikasikan kepada dinas instansi terkait agar mendapat dukungan secara kelembagaan baik dari DPRD maupun dari Bupati (Antonius L. dan Ir. A. Kasmayani, M. H).
- Data penelitian perlu ditambahkan dengan data ijin untuk perusahaan yang dikeluarkan di Kabupaten Kapuas Hulu (Budiarjo, S. H).
- Bagaimana pengaruh hasil penelitian ini terhadap perijinan yang sudah terlanjur dikeluarkan dan menyimpang dari peruntukan lahan yang seharusnya? (A. Gupung, S. TP).
- Perlu dipikirkan juga manfaat hasil studi ini terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang dulu seringkali dirugikan posisinya akibat masuknya kawasan desa/lahan mereka ke dalam kawasan konsesi HPH (A. Gupung, S. TP).
- Bagaimana hubungan lembaga ini dengan Pemerintah Pusat terkait dengan adanya rencana membawa usulan revisi tata guna lahan ke tingkat nasional? Perlu lobby yang cukup kuat untuk tujuan ini (Budiarjo, S. H).

Terkait dengan upaya CoLUPSIA membawa hasil studi tentang draft status dan alokasi tata guna lahan ke tingkat nasional dalam bentuk seminar di Jakarta, diperlukan dukungan dan keterlibatan DPRD dan Dinas instansi terkait di Kabupaten Kapuas Hulu.

- Untuk mendapatkan dukungan dari para pihak yang berkepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu hendaknya pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan kelembagaan bukan individu. Sehingga saat mendapatkan dukungan untuk revisi maka dukungan

yang diperoleh adalah dukungan dari lembaga bukan perorangan (Antonius L. dan A. Manyu).

- Kegiatan CoLUPSIA selama ini sudah memiliki kerja sama dengan lembaga eksekutif di Kapuas Hulu. Apakah sudah ada kelompok kerja untuk kegiatan ini dengan melibatkan Bappeda sebagai motor dalam kegiatan yang berkaitan dengan tata guna lahan?

4. Dukungan DPRD

- Apa yang perlu disiapkan oleh DPRD untuk mendukung kegiatan ini di tingkat nasional? (Budiarjo, S. H).
- Silakan langsung mengajukan apa yang dikendaki dari DPRD terkait dengan hasil studi yang sudah didapatkan (Baco Maiwa, SE).

5. Terjadi diskusi yang cukup hangat tentang produk komunikasi CoLUPSIA terkait dengan narasi 'Skenario masa depan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu menuju tahun 2030' pada Skenario 2: Lempar koin sembunyi tangan yang menggambarkan keadaan ketidakpedulian terhadap sektor pendidikan. Anggota DPRD melihat bahwa pendidikan merupakan hal yang penting sehingga takut apabila keadaan di Skenario 2 tersebut mungkin terjadi sehingga tidak hanya Pemda tetapi juga Pemerintah Pusat dapat mengambil langkah-langkah antisipasi pembenahan di sektor pendidikan kita. Salah satunya dengan mengalokasikan 20% dana untuk pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.

Keempat skenario dan narasinya dibuat melalui tahapan proses workshop PPA dan konsultasi para pihak ditingkat kecamatan dan kabupaten, yang menggambarkan berbagai hal yang mungkin terjadi terhadap pembangunan dimasa yang akan datang berdasarkan kondisi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, diantara empat skenario tersebut, para pihak di Kapuas Hulu memilih skenario 1: Langkah Serampak sebagai kondisi yang diharapkan terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu. Skenario ini menggambarkan adanya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan direncanakan bersama masyarakat, keterlibatan nyata masyarakat dalam proses pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan/monitoring, penggunaan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, terdapat sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, terbukanya akses terhadap pendidikan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Lampiran: Daftar Peserta

Nama	Lembaga
M. Yusuf Habibi S. Sos	Wakil Ketua I DPRD
Iman Shabirin	Ketua Komisi A
Antonius L.	Ketua Komisi C
A. Manyu	Anggota Komisi A
Baco Maiwa, SE	Anggota Komisi B
A. Gupung, S. TP	Anggota Komisi B
Ir. A. Kasmayani, M. H	Anggota Komisi B
Budiarjo, S. H	Anggota Komisi B
Biraun	Anggota Komisi B
Abang M. Isnandar, S. T	Anggota Komisi C
Dedy S. T, M. T	Kasubbid Tata Ruang Bappeda
Syaiful Bahri	Staf Set. DPRD
Dr. Yves Laumonier	CoLUPSIA
Danan Hadi	CoLUPSIA
Bayuni Shantiko	CoLUPSIA
Valentinus Heri	CoLUPSIA
Ade Yanuwardi	CoLUPSIA
Alfa Ratu Simarankir	CoLUPSIA